



**WALIKOTA MADIUN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 38 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 46  
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 46/G), diubah sebagai berikut :

1. Diantara huruf a dan huruf b ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf a1, sehingga Pasal 4 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi dan melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan perpustakaan dan kearsipan ;
  - a1. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perpustakaan dan kearsipan ;
  - b. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan ;
  - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan perpustakaan umum dan kearsipan daerah ;
  - d. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan dan kearsipan ;
  - e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah dan/atau instansi/lembaga Pemerintah dan non Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dinas ; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.
2. Diantara huruf f dan huruf g ayat (2) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf yakni fl, sehingga Pasal 5 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 5**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi pengelolaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, rumah tangga dan administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ;

- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif ;
  - c. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan ;
  - d. pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan Dinas ;
  - e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas ;
  - f. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas ;
  - fl. penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas ; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3. Diantara huruf h dan huruf i ayat (1) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf h1, sehingga Pasal 7 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan ;
  - b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;
  - c. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan Kantor ;
  - d. melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas ;
  - e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris dinas sesuai ketentuan yang berlaku ;

- f. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
  - g. melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai ;
  - h. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan Dinas ;
  - h.l. menyiapkan bahan rencana program, melaksanakan pengadaan dan memelihara sarana dan prasarana di lingkungan Dinas ; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ;
  - b. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas ;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran serta belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta perubahannya di lingkungan Dinas ;
  - d. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Dinas ; dan
  - e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Diantara huruf j dan huruf k ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf j1, sehingga Pasal 8 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (1) Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan pelayanan, pembinaan, pengolahan dan promosi Perpustakaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perpustakaan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Perpustakaan ;
  - b. pelaksanaan kajian dan penelitian minat baca dan pengembangan perpustakaan ;
  - c. pelaksanaan layanan, otomasi, dan kerjasama perpustakaan meliputi layanan sirkulasi, rujukan, literasi informasi, bimbingan pemustaka dan layanan ekstensi (perpustakaan keliling, pojok baca, dan sejenisnya), promosi layanan, pelaksanaan kajian kepuasan pemustaka, pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi perpustakaan, pengelolaan *website* dan jaringan perpustakaan serta pelaksanaan kerjasama antar perpustakaan dan membangun jejaring perpustakaan ;
  - d. pelaksanaan pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan meliputi penyusunan kebijakan pengembangan koleksi, seleksi, pengadaan bahan perpustakaan, inventarisasi, pengembangan koleksi daerah (*local content*), pelaksanaan kajian kebutuhan pemustaka, deskripsi *bibliografi*, klasifikasi, penentuan tajuk subjek, penyelesaian fisik bahan perpustakaan, verifikasi, validasi, dan pemasukan data ke pangkalan data ;

- e. pelaksanaan pelestarian bahan perpustakaan meliputi konservasi melakukan pelestarian fisik bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui perawatan restorasi, dan penjilidan serta pembuatan sarana penyimpanan bahan perpustakaan dan alih media melakukan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui alih media, pemeliharaan serta penyimpanan master informasi digital ;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan meliputi pengembangan semua jenis perpustakaan, implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria pendataan perpustakaan, koordinasi pengembangan perpustakaan, dan pemasyarakatan/ sosialisasi, serta evaluasi pengembangan perpustakaan ;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan meliputi pendataan tenaga perpustakaan, bimbingan teknis, peningkatan kemampuan teknis kepestakawanan, penilaian angka kredit pustakawan, koordinasi pengembangan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, pemasyarakatan/sosialisasi, serta evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan ;
- h. pelaksanaan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca meliputi pengkajian, dan pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca, koordinasi, pemasyarakatan/sosialisasi, dan bimbingan teknis serta evaluasi kegemaran membaca ;
- i. pengendalian tugas di bidang pelayanan dan pembinaan perpustakaan ;
- j. pelaksanaan koordinasi serah simpan karya cetak dan karya rekam dengan perangkat daerah, bumd, instansi terkait dan masyarakat ;

- j1. penyusunan, perencanaan program, pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Bidang Perpustakaan ; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 9**

- (1) Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari :
    - a. Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca ; dan
    - b. Seksi Pengelolaan Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka.
  - (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perpustakaan.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 10**

- (1) Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
  - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas tugas pada Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca ;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran seksi layanan, pengembangan dan pembudayaan kegemaran membaca ;



- c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria seksi layanan, pengembangan dan pembudayaan kegemaran membaca ;
- d. melaksanakan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria kegiatan seksi layanan, pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca ;
- e. menyelenggarakan layanan sirkulasi, layanan informasi, layanan referensi, layanan pinjam antar perpustakaan ;
- f. menyelenggarakan layanan ekstensi (perpustakaan keliling) ;
- g. melaksanakan bimbingan pemustaka ;
- h. melaksanakan stock opname dan penyiangan bahan perpustakaan (*weeding*) ;
- i. melaksanakan promosi layanan ;
- j. melaksanakan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan perpustakaan ;
- k. melaksanakan kajian kepuasan pemustaka ;
- l. menyusun statistik perpustakaan ;
- m. melaksanakan penyusunan, pengembangan dan pengelolaan kerja sama antar perpustakaan ;
- n. melaksanakan pembinaan, dan pengembangan perpustakaan ;
- o. melaksanakan bimbingan teknis, peningkatan kemampuan teknis kepustakawanan ;
- p. melaksanakan koordinasi pengembangan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan ;
- q. melaksanakan pembinaan monitoring dan evaluasi pengembangan perpustakaan dan tenaga pengelola perpustakaan ;
- r. melaksanakan pengkajian minat baca masyarakat ;
- s. menyiapkan bahan pemasyarakatan/sosialisasi pembudayaan kegemaran membaca ;
- t. memfasilitasi aplikasi sistem informasi perpustakaan yang terintegrasi berbasis Teknologi Informasi ;

- u. mengelola dan mengembangkan perangkat keras, lunak, pangkalan data dan jaringan otomasi perpustakaan ;
  - v. mengelola dan mengembangkan *website* ; dan
  - w. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perpustakaan.
- (2) Seksi Pengelolaan Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas tugas pada Seksi Pengelolaan Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka ;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran seksi pengembangan koleksi, pengolahan dan pelestarian bahan pustaka ;
  - c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria seksi pengembangan koleksi, pengolahan dan pelestarian bahan pustaka ;
  - d. melaksanakan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria kegiatan seksi pengembangan koleksi, pengolahan dan pelestarian bahan pustaka ;
  - e. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi seksi pengembangan koleksi, pengolahan dan pelestarian bahan pustaka ;
  - f. melaksanakan penerimaan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam terbitan daerah, pengarang daerah, dan koleksi kedaerahan ;
  - g. melaksanakan pengembangan koleksi bahan perpustakaan melalui pembelian, hadiah, hibah, dan tukar menukar bahan perpustakaan ;
  - h. melaksanakan penganekaragaman bahan perpustakaan yang mencakup kegiatan transliterasi (alih aksara), translasi (terjemahan), dan sejenisnya ;

- i. melaksanakan pemetaan naskah kuno dan koleksi daerah (*local content*) di wilayahnya ;
- j. melaksanakan pengumpulan, penghimpunan, pengelolaan naskah kuno dan koleksi daerah (*local content*) ;
- k. melaksanakan penyusunan deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek, dan penyelesaian fisik bahan perpustakaan ;
- l. melaksanakan pelaksanaan verifikasi, validasi, pemasukan data ke pangkalan data ;
- m. melaksanakan alih media bahan pustaka dan naskah kuno daerah ;
- n. melaksanakan konservasi bahan perpustakaan ;
- o. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka ;
- p. memonitor, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- pl. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan/mengadakan sarana dan prasarana di bidang perpustakaan ; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perpustakaan.

7. Diantara huruf c dan huruf d ayat (2) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf cl, sehingga Pasal 11 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 11**

- (1) Bidang Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan pengelolaan layanan arsip dan pembinaan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kearsipan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Kearsipan ;

- b. pelaksanaan dan pembinaan teknis di Bidang Kearsipan ;
  - c. pelaksanaan, pengelolaan dan layanan arsip ;
  - c1. penyusunan rencana program pelaksanaan/pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang kearsipan ; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
8. Diantara huruf v dan huruf w ayat (1) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf v1, sehingga Pasal 13 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 13**

- (1) Seksi Pengelolaan dan Layanan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas tugas pada Seksi Pengelolaan dan Layanan Arsip ;
  - b. merumuskan sasaran pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
  - c. menghimpun data, menyusun rumusan indikator kinerja utama, rencana kerja, program, kegiatan dan penetapan kinerja sesuai dengan lingkup tugasnya ;
  - d. menghimpun, menganalisa data sebagai bahan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya ;
  - e. melaksanakan pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah ;
  - f. melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, organisasi masyarakat/politik dan perorangan ;
  - g. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya ;

- h. melaksanakan kerja sama dan kemitraan dengan perangkat daerah dan/atau instansi/lembaga pemerintah dan non pemerintah sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- i. melaksanakan penelusuran dan akuisisi arsip statis ;
- j. melaksanakan program arsip vital ;
- k. melakukan kegiatan autentifikasi arsip statis ;
- l. melaksanakan fasilitasi pemeliharaan, penggunaan dan penyusutan arsip dengan retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun ;
- m. melaksanakan pengelolaan arsip inaktif Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki retensi 10 (sepuluh) tahun atau lebih ;
- n. melakukan pengolahan, preservasi dan akses arsip statis ;
- o. melaksanakan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana dan perubahan kelembagaan ;
- p. menyiapkan bahan dalam rangka penerbitan naskah sumber arsip ;
- q. melaksanakan pengamanan, pemeliharaan, penyimpanan dan alih media arsip ;
- r. melaksanakan sistem informasi kearsipan ;
- s. melaksanakan jaringan informasi kearsipan nasional ;
- t. mengelola sistem informasi kearsipan dinamis dan statis ;
- u. mengelola *database* informasi kearsipan ;
- v. memelihara sarana dan prasarana jaringan sistem informasi kearsipan ;
- vl. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan/mengadakan dan memelihara sarana dan prasarana di bidang kearsipan ; dan
- w. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Kearsipan.

- (2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan ;
  - b. merumuskan sasaran pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
  - c. menghimpun data, menyusun rumusan indikator kinerja utama dan penetapan kinerja sesuai dengan lingkup tugasnya ;
  - d. menghimpun data, menyusun rencana strategis, rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya ;
  - e. menghimpun data, menyusun rumusan kebijakan teknis operasional sesuai dengan lingkup tugasnya ;
  - f. menghimpun data, menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya ;
  - g. menghimpun, menganalisa data sebagai bahan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya ;
  - h. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya ;
  - i. melaksanakan kerja sama dan kemitraan dengan perangkat daerah dan/atau instansi/lembaga pemerintah dan non pemerintah sesuai dengan lingkup tugasnya ;
  - j. melaksanakan bimbingan dan konsultasi, sosialisasi kearsipan, pemantauan, asistensi, fasilitasi, supervisi dan evaluasi pelaksanaan kearsipan pada perangkat daerah, kelurahan, perusahaan, organisasi kemasyarakatan/ organisasi politik dan masyarakat ;

- k. melaksanakan bimbingan dan konsultasi dan pengendalian di bidang perencanaan kebutuhan jabatan fungsional arsiparis di daerah, serta bimbingan dan konsultasi Sumber Daya Manusia kearsipan, pengelolaan data, evaluasi fungsi dan tugas jabatan fungsional arsiparis ;
- l. melaksanakan pengawasan kearsipan, audit kearsipan, penilaian hasil pengawasan, dan monitoring hasil pengawasan penyelenggaraan kearsipan kepada perangkat daerah, kelurahan, perusahaan dan organisasi kemasyarakatan/organisasi politik ;
- m. memonitor, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- n. melakukan pemindahan arsip inaktif seksi pembinaan, masyarakat kearsipan dan akuisisi ke unit kearsipan ;
- o. melaksanakan monitoring, penilaian, verifikasi arsip, penetapan status arsip ;
- p. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pemberian persetujuan pemusnahan arsip satuan kerja perangkat daerah ;
- q. melakukan penetapan jadwal retensi arsip satuan kerja perangkat daerah ;
- r. melakukan koordinasi bidang kearsipan dengan satuan kerja perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota lain, pemerintah provinsi dan Arsip Nasional Republik Indonesia maupun dengan lembaga/instansi luar negeri ; dan
- s. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Kearsipan.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 14 September 2018

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 14 September 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**RUSDIYANTO, SH, M.Hum.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19671213 199503 1 003**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2018 NOMOR 38/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**BUDI WIBOWO, SH**

**Pembina**

**NIP. 19750117 199602 1 001**



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN  
NOMOR : 38 TAHUN 2018  
TANGGAL : 14 September 2018

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**



WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.